

PERENCANAAN PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR

Oleh : Achmad Djunaedi dan M. Natsir Basuki ^{*)}

Abstrak

Wilayah pantai/pesisir mempunyai karakter yang spesifik dibandingkan dengan kawasan yang lain.. Wilayah ini merupakan agregasi dari berbagai komponen ekologi dan fisik yang saling terkait dan saling berinteraksi. Pembangunan dengan memanfaatkan sumberdaya pantai tanpa memperhatikan prinsip-prinsip ekologis akan dapat merusak fungsi ekosistem pantai.

Pengembangan wilayah pada kawasan pesisir sebagaimana pengembangan wilayah pada kawasan lainnya, mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ini dilakukan melalui perencanaan pengembangan dalam suatu proses yang didalamnya terdapat berbagai pendekatan yang harus diperhatikan.

Dewasa ini pembangunan pada kawasan pantai berkembang sangat pesat dan ditunjukkan dengan adanya multi kegiatan, misalnya usaha tambak, nelayan, pengusaha industri, hotel dan rekreasi wisata, dan usaha-usaha. Dengan semakin meningkat dan kompleksitas kegiatan didalamnya maka perlu dilakukan perencanaan pengembangan kawasan pantai/pesisir.

Pengelolaan wilayah pantai secara terpadu (Intergrated Coastal Zone Management) merupakan kunci bagi pembangunan melalui pemecahan problem dan konflik di wilayah pantai yang sangat pelik dan kompleks.

Katakunci : kawasan pesisir, terpadu, pengelolaan.

1. PENDAHULUAN

Pada umumnya satu wilayah berkembang dari keadaan yang tingkat kompleksitasnya lebih rendah menuju kepada keadaan yang kompleksitasnya lebih tinggi. Meningkatnya kompleksitas tersebut menyebabkan bertambahnya problem kebijakan pengembangan wilayah yang sering menjadi tidak mudah diselesaikan. Terdapat banyak kasus pada problem pengembangan wilayah, dan problem-problem semacam ini akan terjadi pula dalam pengembangan wilayah pesisir.

Sebagaimana diketahui bahwa suatu wilayah itu mempunyai kondisi yang spesifik. Apabila dibandingkan kondisi wilayah yang satu terhadap lainnya, maka masing-masing akan berbeda, yaitu perbedaan dari sisi karakteristiknya, dan bila dilihat lebih mendalam maka akan berbeda pula problem yang ada atau terjadi didalamnya. Dengan demikian, akan memiliki perbedaan dalam cara penanganannya. Adapun karakteristik wilayah pesisir yang spesifik adalah bahwa pada wilayah ini merupakan agregasi dari berbagai komponen ekologi dan fisik yang

saling mempengaruhi, serta secara ekologis sangat rapuh¹⁾. Pembangunan atau pengusahaan sumberdaya alam yang tidak memperhatikan prinsip-prinsip ekologi akan sangat mudah merusak proses atau fungsi ekosistem pantai. Disamping itu ditunjukkan adanya komunitas serta terdapatnya multi kegiatan pada wilayah pesisir, misalya: petambak, nelayan, petani, pengusaha industri, hotel dan rekreasi wisata, dan usaha-usaha yang berhubungan dengan laut atau pesisir.

Pengembangan wilayah pada kawasan pesisir sebagaimana pengembangan wilayah pada kawasan lainnya, tujuan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ini dilakukan melalui perencanaan pengembangan dalam suatu proses yang didalamnya terdapat berbagai pendekatan yang harus diperhatikan.

Dalam kaitan tersebut, maka akan dicoba menyajikan gambaran secara ringkas bagaimana perencanaan pengembangan pesisir yang diawali terlebih dahulu dengan pengenalan konsep wilayah/kawasan dan pengertian wilayah/kawasan pesisir. Secara keseluruhan, akan disajikan secara ringkas mengenai problem-problem yang ada, pendekatan-

^{*)} BAPPEDA Daerah Istimewa Yogyakarta

pendekatan perencanaan pengembangan wilayah pesisir, dan proses-proses yang ada.

2. KONSEP WILAYAH

Dalam perencanaan pengembangan wilayah sering terlebih dahulu dilakukan delineasi wilayah (region) yang didalamnya terdapat kegiatan untuk menentukan batas-batas wilayah. Penentuan batas wilayah dengan memperhatikan terhadap konsep wilayah. Dalam kaitan ini, konsep wilayah lebih menekankan "*wilayah*" sebagai suatu alat (*means*) untuk suatu tujuan dibandingkan dengan tujuannya sendiri. Sebagai suatu konsep, dapat ditunjukkan dengan mengambil contoh konsep wilayah yang telah digunakan sebagai suatu metode klasifikasi melalui dua fase yang berbeda, yaitu dari fase yang merefleksikan kemajuan ekonomi dari suatu ekonomi agraris yang sederhana menuju suatu sistem perindustrian yang kompleks. **Fase pertama** memperlihatkan *wilayah formal* (menyangkut uniformitas, dan didefinisikan melalui homogenitas), sementara **fase kedua** menunjukkan perkembangannya sebagai *wilayah fungsional* (menyangkut interdependen, interrelationship dan didefinisikan berdasarkan hubungan internasional)²⁾.

Suatu wilayah formal merupakan suatu area geografis yang uniform atau homogen dalam kriteria-kriteria tertentu. Kriteria yang utama adalah secara fisik (seperti topografi, iklim atau vegetasi) terkait dengan konsep penentuan geografis. Dalam perkembangannya kriteria tersebut bergeser dengan kriteria ekonomi (termasuk jenis industri atau pertanian), dan kriteria sosial dan politik. Suatu wilayah fungsional merupakan area geografis yang menampilkan suatu keterkaitan fungsional tertentu, suatu interdependen bagian-bagian, dan didefinisikan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Terkadang menunjuk pada suatu wilayah nodal atau kutub dan tersusun dari unit-unit heterogen seperti kota-kota atau pusat-pusat kegiatan, desa-desa atau bagian-bagian wilayah yang secara fungsional terkait. Keterkaitan ini biasanya terungkap dalam bentuk aliran-aliran, dengan menggunakan kriteria sosio-ekonomi²⁾.

Wilayah formal atau fungsional, atau kombinasi keduanya dapat menghasilkan kerangka yang bermanfaat

untuk klasifikasi jenis ketiga yaitu *wilayah perencanaan*. Di dalam prakteknya wilayah formal dan wilayah fungsional jarang berimpit, sehingga identifikasi wilayah-wilayah perencanaan kemudian dikompromikan³⁾. Adapun untuk wilayah pesisir, penentuan batas fisik ruang wilayah dalam kaitannya dengan usaha pengelolaannya dilakukan secara berbeda pada berbagai negara, dan bahkan tiap-tiap daerah di Indonesia juga berbeda. Dengan mengambil contoh tersebut, maka pada wilayah pesisir, kecuali barangkali pada wilayah-wilayah pantai yang relatif masih "*perawan*", pada umumnya wilayah pantai telah atau sedang berkembang atau dikembangkan menjadi suatu wilayah fungsional¹⁾. Terkait dengan ini, maka wilayah perencanaan dari wilayah pesisir dapat diambil secara kompromistis antara wilayah formal dengan wilayah fungsional.

3. KARAKTERISTIK WILAYAH PESISIR

Wilayah pantai/pesisir mempunyai karakter yang spesifik. Wilayah ini merupakan agregasi dari berbagai komponen ekologi dan fisik yang saling terkait dan saling mempengaruhi, serta secara ekologis sangat rapuh. Sebagaimana telah disinggung di depan bahwa pembangunan sumberdaya alam yang tidak memperhatikan prinsip-prinsip ekologi akan sangat mudah merusak proses atau berfungsinya ekosistem pantai³⁾. Suatu ekosistem pantai adalah komposisi dari berbagai komponen (komponen ekologi dan biologi, serta lingkungan fisik pantai) serta interaksinya. Komponen ekologi dan biologi dari ekosistem pantai termasuk spesi binatang, tumbuhan dan organisme. Setiap spesi mempunyai peranan fungsi yang unik di dalam ekosistem pantai dan mempunyai habitat tertentu. Lingkungan fisik pantai meliputi perairan pantai, muara sungai, karang pantai. Interaksi antar komponen dari ekosistem pantai terjadi melalui pertukaran energi dan zat, yang dimulai dengan konservasi cahaya matahari, nutrien dasar, karbon dioksida dan mineral oleh tumbuhan (*primary producers*) menjadi jaringan tumbuh-tumbuhan (*plant tissues*) yang merupakan bahan dasar makanan untuk binatang.

Beberapa komponen dari ekosistem pantai berfungsi sebagai unit yang menyimpan "*energy supply*". Cadangan energi berfungsi menstabilisasikan ekosistem dan sebagai "*buffer*" terhadap kebutuhan energi yang besar yang terjadi pada musim atau periode waktu tertentu. Kombinasi dari masuknya air tawar ke perairan pantai, angin, ombak laut, temperatur,

kekeruhan sangat mempengaruhi berfungsinya proses ekosistem pantai³⁾. Perubahan yang menonjol pada komponen dan rantai interaksi utama ekosistem pantai, terutama diakibatkan oleh proses pembangunan dan pendayagunaan sumber daya alam pantai, dapat mengakibatkan terganggunya proses dan integritas ekosistem yang selanjutnya menimbulkan degradasi lingkungan yang mengakibatkan kerugian pada masyarakat di wilayah pantai.

Disamping itu ditunjukkan juga adanya komunitas dan multi kegiatan pada wilayah pantai misalnya petambak, nelayan petani, pengusaha industri, hotel dan rekreasi wisata, dan usaha-usaha yang berhubungan dengan laut pesisir. Dalam hal ini, meningkatnya kompleksitas didalamnya perlu diperhatikan melakukan perencanaan pengembangan kawasan pantai/pesisir.

4. PERMASALAHAN DAN KONFLIK DI WILAYAH PANTAI

Tekanan yang keras dari proses pembangunan di wilayah pantai akan berakibat pada gangguan atau dampak yang merusak pada fungsi dan integritas dari ekosistem pantai. Akibat yang timbul adalah degradasi lingkungan dan menurunnya tingkat kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat pesisir. Upaya yang efektif untuk meminimalkan dampak negatif pembangunan ekonomi dan integritas ekosistem pantai adalah menekankan usaha konservasi sumber daya alam pantai untuk menunjang pembangunan jangka panjang dan berkelanjutan. Namun di dalam prakteknya, pendekatan pengelolaan tersebut tidak sepenuhnya fleksibel secara politis dan sukar dilaksanakan. Manfaat jangka pendek dari pembangunan ekonomi dan penggunaan sumber daya alam, pada kenyataannya, dibutuhkan di dalam pengembangan ekonomi dan perbaikan kondisi sosial masyarakat pantai. Dengan demikian pertimbangan-pertimbangan praktis dari berbagai pandangan harus diupayakan untuk menyeleraskan kepentingan yang berorientasi jangka pendek dan jangka panjang.

Adanya kecenderungan yang nyata dari konflik antara pengguna/pemakai sumber daya alam pantai, pada prinsipnya karena masalah eksternalitas dan

overuses. Masalah ekseternalitas adalah dampak yang terjadi pada pihak ketiga diluar proses transaksi ekonomi. Upaya untuk menginternalkan tersebut dapat dilakukan melalui biaya sosial (*sosial cost*) kedalam proses produksi (caranya dapat bermacam-macam, effluent charges, bargaining-negosiasi antar pihak ketiga dengan pihak pencemar lingkungan). *Overuses* terjadi karena setiap "user" berusaha memaksimalkan pengguna/pemakai sumber daya alam. Konflik akibat eksternalitas dan overuses apabila tidak ditangani secara cepat dan tepat akan menimbulkan menurunnya kualitas lingkungan. Konflik inipun akan menimbulkan golongan lemah akan semakin menderita dan selanjutnya tergusur dari wilayah pantai³⁾.

Problem dan konflik yang cenderung terjadi akibat adanya "*multiple management entities*" adalah fragmentasi di dalam pengambilan keputusan, duplikasi/overlapping kewenangan/yuridiksi adalah tidak efektif dan tidak efisien. Agar menjadi efektif dan efisien, maka problem tersebut harus dipecahkan. Konflik kadang mempunyai dampak positif di dalam merangsang kreatifitas pemecahan masalah di dalam manajemen publik. Namun konflik kewenangan dan kepentingan yang berkepanjangan akan menghambat pencapaian tujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan wilayah dan ekosistem pantai.

5. PERENCANAAN WILAYAH PANTAI SECARA TERPADU

Para ahli di bidang pengelolaan wilayah pantai berpendapat bahwa pengelolaan wilayah pantai secara terpadu (*Integrated Coastal Zone Management*) merupakan kunci bagi pemecahan problem dan konflik di wilayah pantai yang sangat pelik dan kompleks³⁾. Keterpaduan di dalam manajemen publik dapat didefinisikan sebagai penentuan goals dan objektif secara simultan, melakukan secara bersama-sama pengumpulan informasi, perencanaan dan analisis secara kolektif, penggunaan secara bersama-sama perangkat/instrumen pengelolaan. Pada kenyataannya, integrasi yang bersifat ideal sebagaimana dikemukakan di atas tidak pernah akan dapat terjadi atau dilakukan. Di dalam praktek integritasi ini biasanya merupakan upaya koordinasi antara berbagai enstitusi/lembaga terkait untuk menyelaraskan berbagai kepentingan, prioritas dan tindakan. Usaha untuk melakukan koordinasi ini dapat dilakukan dengan menggunakan mekanisme, prosedur dan rencana. Dengan demikian, rencana

wilayah pantai terpadu disamping berfungsi sebagai arahan bagi pengembangan, strategi yang dilakukan dan tindakan yang akan dilaksanakan, juga berfungsi sebagai instrumen koordinasi.

6. PENDEKATAN PERENCANAAN PENGEMBANGAN PESISIR

Konsepsi pengembangan wilayah dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan dan selalu terdapat issue-issue yang lebih menonjol tergantung dari kondisi wilayah pesisir bersangkutan. Pendekatan-pendekatan ini meliputi : (1) pendekatan ekologis; (2) pendekatan fungsional/ekonomi; (3) pendekatan sosio-politik; (4) pendekatan behavioral dan kultural.

Pendekatan ekologis menekankan pada tinjauan ruang wilayah sebagai kesatuan ekosistem. Pendekatan ini sangat efektif untuk mengkaji dampak suatu pembangunan secara ekologis, akan tetapi kecenderungan mengesampingkan dimensi sosial, ekonomis dan politis dari ruang wilayah. Pendekatan fungsional ekonomi, menekankan pada ruang wilayah sebagai wadah fungsional berbagai kegiatan, dimana faktor jarak atau lokasi menjadi penting. Pendekatan sosial politis, menekankan pada aspek "*penguasaan*" wilayah. Pendekatan ini melihat wilayah tidak saja dilihat dari berbagai sarana produksi namun juga sebagai sarana untuk mengakumulasi power. Konflik-konflik yang terjadi dilihat sebagai konflik yang terjadi antar kelompok. Pendekatan ini juga melihat wilayah sebagai teritorial, yakni mengaitkan ruang-ruang bagian wilayah tertentu dengan satuan-satuan organisasi tertentu. Pendekatan behavioral dan kultural, menekankan pada keterkaitan antara wilayah dengan manusia dan masyarakat yang menghuni atau memanfaatkan ruang wilayah tersebut. Pendekatan ini menekankan perlunya memahami perilaku manusia dan masyarakat dalam pengembangan wilayah. Pendekatan ini melihat aspek-aspek norma, kultur, psikologi masyarakat yang berbeda akan menghasilkan konsepsi wilayah yang berbeda.

Disamping pendekatan-pendekatan yang bersifat substansial seperti diatas, terdapat beberapa pendekatan yang bersifat instrumental. Pendekatan instrumental ini dapat dikategorikan dalam 4 (empat) kelompok besar, yaitu (1)

instrumen hukum dan peraturan; (2) instrumen ekonomi; (3) instrumen program dan proyek; dan (4) instrumen alternatif.

Instrumen hukum dan peraturan mempunyai konsep atau ide dasar adanya hukum dan peraturan beserta penegakannya. Instrumen ini antara lain berupa hukum dan peraturan-peraturan seperti ijin lokasi, ijin bangunan, AMDAL dan sebagainya. Instrumen ekonomi mempunyai konsep atau ide dasar adanya pengaruh ekonomi pasar yang sangat signifikan terhadap pengembangan wilayah. Contoh dari penerapan instrumen ini adalah adanya penerapan pajak, retribusi serta insentif dan disinsentif yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang. Instrumen program dan proyek khususnya yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah didasari atas konsep atau ide dasar pada kebutuhan-kebutuhan dasar dan kepentingan masyarakat luas. Penerapan instrumen ini seperti pembangunan sarana dan prasarana wilayah dan sejenisnya. Instrumen alternatif berdasarkan konsep atau ide dasar adanya pemberdayaan masyarakat dari kemitraan. Contoh-contoh dari penerapan instrumen ini antara lain meliputi pelatihan, pendidikan, partisipasi masyarakat, adanya proyek-proyek percontohan, penghargaan kepada pelaku masyarakat dan swasta atau pelaku pembangunan lainnya.

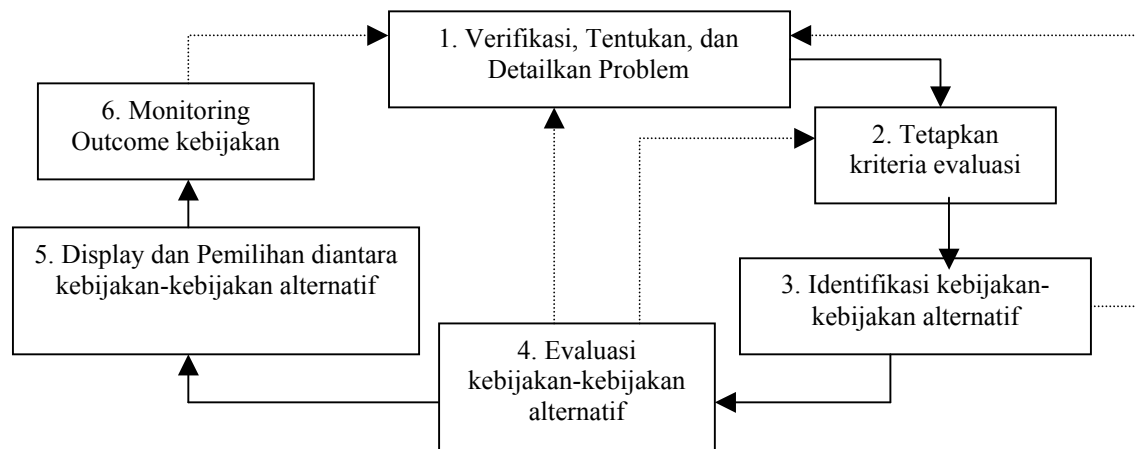
7. PROSES PERENCANAAN

Proses dan langkah-langkah ini secara sederhana dapat diperlihatkan sebagai Proses Perencanaan – Implementasi – Evaluasi Kawasan Pesisir Pantai. Penyusunan rencana, pada umumnya dirangsang oleh adanya problem dan konflik yang kritis diwilayah pantai. Hal ini menimbulkan kesadaran akan perlunya perencanaan wilayah pantai terpadu. Keadaan ini, dilanjutkan dengan inisiatif dari pihak pemerintah daerah maupun pusat untuk melakukan persiapan penyusunan rencana. Proses perencanaan ini bersifat iteratif dan memungkinkan adanya umpan balik ganda (*multiple feedback*).

Proses dan langkah-langkah dasar dalam perencanaan dapat ditunjukkan seperti gambar dibawah yang terdiri dari 6 langkah¹⁾ yaitu: definisi problem, menetapkan kriteria evaluasi, identifikasi alternatif-alternatif, evaluasi alternatif-alternatif, perbandingan alternatif-alternatif, dan penilaian out-come. Hal yang demikian adalah merupakan langkah-langkah umum dalam proses, dan tiap langkah dapat dijabarkan ke dalam komponen yang lebih detail. Perlu diketahui bahwa dalam

perencanaan, para perencana boleh jadi menggunakan bermacam jalur, dikarenakan perbedaan dalam training, waktu yang

tersedia untuk analisis, kompleksitas problem, sumber-daya yang tersedia, dan afiliasi organisasional.



Langkah pertama (mendefinisikan problem) adalah usaha mengetahui posisi-posisi dan pengaruh dari berbagai individu-individu dan kelompok-kelompok. Sehingga seorang perencana mesti bertanya. Siapa yang berkepentingan terhadap problem? Mengapa? Apa saja persoalan mereka? Kekuasaan apa yang dipunyai untuk mempengaruhi keputusan kebijakan?

Kelompok tersebut terkadang sangat berarti dan bermacam-macam. Dalam langkah ini perlu diketahui apakah informasi yang cukup telah tersedia untuk suatu analisis dan apakah ada manfaat untuk mengumpulkan data yang lebih banyak. Kira-kira seberapa usaha diperlukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dasar, dan seberapa kedalaman studi/rencana akan dibuat?

Tantangan dalam langkah ini adalah menyatakan problem dengan penuh makna, menghilangkan materi-materi yang tidak relevan, menyatakannya dengan angka-angka, berfokus pada sentral. Faktor-faktor yang kritis, dan mendefinisikan problem dengan cara menghilangkan hal-hal yang bersifat ambigu. Setelah usaha ini, akan diketahui apakah terdapat problem yang dapat diselesaikan, apakah mampu untuk mengembangkan problem dengan statemen yang detail, dan apakah mampu untuk mengestimasi waktu dan sumberdaya bagi analisis yang diperlukan.

Langkah kedua (penetapan kriteria evaluasi), perlu diketahui kapan suatu problem diselesaikan atau kapan kebijakan yang tepat atau yang bersifat dapat diterima

diidentifikasi? Bagaimana kebijakan-kebijakan yang mungkin ada akan diperbandingkan? Apakah kebijakan yang diusulkan akan mempunyai bermacam dampak dan mempengaruhi kelompok-kelompok yang berbeda? Kebijakan-kebijakan akan diterima oleh kelompok satu, akan tetapi kemungkinan ditolak oleh kelompok lain, atau malah membahayakan kepada kelompok lain.

Untuk membandingkan, mengukur dan melakukan pemilihan di antara alternatif-alternatif, kriteria evaluasi yang relevan harus diterapkan. Untuk ini, biasanya dengan melakukan pengukuran-pengukuran termasuk *cost*, *net benefit*, efektifitas, efisiensi, kewajaran, kemudahan administrasi, legalitas, dan penerimaan secara politis.

Dimana perencana dapat menemukan kriteria keputusan? kadang-kadang "*pihak lain*" telah mengembangkannya, atau secara langsung diukur, atau secara tidak langsung melalui pernyataan mengenai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran. Terkadang semua kriteria adalah sama, maka perencanaan harus menunjukkan yang paling relevan terhadap pihak-pihak yang terlibat. Ketika alternatif-alternatif dievaluasi, hal ini menjadi penting untuk dicatat individu dan kelompok yang terlibat dan yang dipuaskan dengan kebijakan alternatif. Keutamaan relatif dari kriteria keputusan kemudian menjadi hal yang pokok untuk analisis.

Langkah ketiga (identifikasi kebijakan alternatif) dalam proses, perencana harus mengetahui nilai-nilai, tujuan, dan sasaran-sasaran yang tidak saja bagi pihak-pihak tertentu, namun juga kepada seluruh pihak

yang terlibat. Identifikasi terhadap kriteria adalah digunakan untuk pertimbangan alternatif-alternatif dan membantu untuk membuat kebijakan alternatif.

Membuat dan mengkombinasikan alternatif-alternatif dapat mengungkap aspek-aspek problem yang tidak teridentifikasi sebelumnya. Pengujian alternatif-alternatif dengan menggunakan analogi-analogi terhadap situasi lain dapat mengembangkan wawasan tambahan. Hal ini bisa jadi penting untuk redefinisi problem oleh karena informasi ini, dan pernyataan kembali formulasi problem dapat mengarahkan dalam revisi atau penambahan kriteria evaluasi. Tantangan dalam langkah ini adalah menghindari penempatan yang prematur dalam kondisi jumlah pilihan-pilihan yang terbatas.

Langkah keempat (evaluasi kebijakan-kebijakan alternatif) dalam proses adalah evaluasi kebijakan alternatif dan paket-paket kebijakan ke dalam strategi dan program. Apa saja dampak-dampak yang diharapkan dari masing-masing kebijakan? Seberapa jauh masing-masing kebijakan memenuhi kriteria evaluasi?

Kegiatan evaluasi ini dapat mengungkap alternatif-alternatif yang memenuhi sebagian besar atau seluruh kriteria umum, dan dapat pula mengungkap hal-hal lain yang dapat dibuang dengan sedikit analisis tambahan. Beberapa alternatif butuh eksaminasi lebih lanjut. Data tambahan mungkin harus dikumpulkan. Selama tahap ini adalah merupakan hal penting bagi seorang analisis untuk memeriksa perbedaan antara kelayakan ekonomi atau kelayakan teknis dengan alternatif yang *acceptable* secara politis. Formulasi kebijakan – desain dan evaluasi alternatif atau pilihan kebijakan – dimaksudkan pada pendefinisian problem secara tepat dan menemukan solusi-solusi yang layak dan efektif. Apakah solusi-solusi ini dapat diimplementasikan adalah merupakan pertanyaan politis esensial.

Evaluasi kebijakan juga merupakan suatu simpul analisis dimana problem tidak ada lagi sebagaimana telah didefinisikan atau sebagaimana telah terdefiniskan. Informasi yang ada selama identifikasi dan evaluasi kebijakan dapat mengungkap aspek-aspek baru dari suatu problem yang dapat dipakai untuk kriteria evaluasi tambahan atau adanya perbedaan.

Hasil evaluasi dapat ditampilkan dengan beberapa cara. Bila kriteria dapat diwujudkan dalam bentuk kuantitatif, skema-

skema perbandingan nilai-nilai dapat digunakan untuk meringkaskan keuntungan-keuntungan dan kekurangan-kekurangan dari masing-masing alternatif. Hasil evaluasi juga dapat ditampilkan sebagai suatu skenario-skenario, dengan metode-metode kuantitatif, analisis kualitatif, dan pertimbangan politis yang kompleks dapat dilakukan. Seperti skenario yang menjelaskan alternatif-alternatif, laporan biaya dari pilihan-pilihan, identifikasi siapa diuntungkan dan siapa yang dirugikan dengan masing-masing alternatif, dan siap pelaku ekonomi, politik, legal, dan cabang-cabang administratif dari masing-masing pilihan.

Agar terus diingat mengenai perbedaan antara suatu alternatif yang unggul secara teknis dengan suatu kelangsungan politis. Terkadang setelah diketahui alternatif yang lebih bagus dalam pengertian teknis, disini masih dibutuhkan tugas lanjut untuk menghadapi oposisi politik. Gunakan analisis kelayakan politis untuk mendisplay alternatif-alternatif dan menjawab pertanyaan-pertanyaan : Apakah para pengambil keputusan yang relevan mempunyai interest dan pengaruh terhadap implementasi kebijakan? Apakah suatu kebijakan yang kurang komprehensif yang dibahas merupakan bagian dari problem dan apakah akan diselesaikan dengan partisipan yang lebih sedikit membawa sukses yang lebih? Akankah mekanisme administratif diperlukan? Jika kebijakan tidak dibuat atau diimplementasikan dalam suatu kekosongan, lainnya harus didesak untuk membuat keputusan-keputusan dan beberapa unit pemerintahan kadang butuh untuk bekerja sama.

Dari penjelasan tersebut keterkaitan dengan persoalan-persoalan dan alternatif-alternatif melalui proses ini, disini perlu ditanyakan kembali apakah problem yang sebenarnya telah teridentifikasi, apakah komponen-komponen penting dari suatu problem terlewatkan dan apakah alternatif yang nyata telah dievaluasi. Apakah kondisi-kondisi yang telah berubah memerlukan revisi dengan pembahasan alternatif-alternatif? Apakah terdapat pilihan-pilihan baru? Apakah terdapat data baru? Akankah bagian-bagian analisis dilaksanakan kembali dengan menggunakan data-data ini? Pemeriksaan-pemeriksaan yang cermat akan mengantar dalam keberhasilan.

Akhirnya, apa-apa yang tetap dilakukan untuk mengimplementasikan kebijakan? Tugas dan tanggung jawab harus

ditentukan. Rencana untuk monitoring dan evaluasi kebijakan yang telah diimplementasikan harus dibuat.

Setelah suatu kebijakan diimplementasikan, mungkin akan terdapat sejumlah keragu-raguan apakah problem telah diselesaikan secara tepat, apakah kebijakan yang telah dipilih diimplementasikan seperti seharusnya. Untuk perhatian ini perlu kebijakan-kebijakan dan program-program untuk menjaga dan memonitor selama implementasi untuk menjamin bahwa tiada perubahan yang tidak disengaja, mengukur dampak, menghentikan apakah dampak bakal terjadi, dan memutuskan kebijakan dan program akan diteruskan, dimodifikasi, atau diakhiri.

1. Kawik Sugiana, *Pengenalan Perencanaan Wilayah Pantai*, _____, UGM
2. Bakti Setiawan, *Tata Ruang dan Lingkungan Hidup*, _____.
3. Patton, V.P. & Sawicki, D.S., *Basic Method of Policy Analysis and Planning*, 1986, Prentice Hall, New Jersey.

8. PENUTUP

Dari penjelasan tersebut diatas perlu kiranya disampaikan berapa catatan, antara lain:

1. Bahwa masing-masing wilayah berbeda satu dengan yang lain dan berbeda pula problem yang dimiliki, oleh karena itu penanganannya akan berbeda pula.
2. Dalam perencanaan pengembangan wilayah pesisir, hendaknya masyarakat dapat dilibatkan mulai dari perencanaan adalah merupakan hal yang sangat mutlak.
3. Masyarakat harus sadar terhadap perencanaan dan problem-problem serta "mengakui" rencana-rencana ini. Untuk ini diperlukan suatu rencana yang sifatnya logis, realistis, implementatif, fleksibel, dan acceptable bagi masyarakat.
4. Pada beberapa kasus, perencanaan kawasan boleh jadi lebih bermanfaat daripada perencanaan wilayah.

DAFTAR PUSTAKA